
DETERMINAN KEMISKINAN DI PROVINSI JAMBI

Prima Audia Daniel¹

Dosen Tetap Universitas Muhammadiyah Jambi¹
Primaaudia@ymail.com

Ahmad Soleh²

Dosen Tetap Universitas Muhammadiyah Jambi²
mas.soleh@yahoo.com

Hendra Kurniawan³

Dosen Tetap Universitas Muhammadiyah Jambi³
awang160576@gmail.com

Deni Firmansyah⁴

Mahasiswa Universitas Batanghari Jambi⁴
denifrimansyah1994@gmail.com

Abstrak

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang disajikan dalam bentuk data tahunan/series mulai tahun 2010-2019, yang diperoleh dari lembaga BPS RI, BPS Provinsi Jambi dan Bappeda Provinsi Jambi. Alat analisis menggunakan model Analisis Model Regresi Berganda dan Korelasi Pearson dengan menggunakan software eviews 8.0 dan SPSS versi 21.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi (GE) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan dalam menurunkan kemiskinan Provinsi Jambi, sedangkan jumlah penduduk produktif (JP) justru berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kemiskinan di Provinsi Jambi selama periode 2010-2019. Sedangkan pengeluaran pemerintah dan angkatan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap naik atau turunnya kemiskinan Provinsi Jambi selama periode 2010-2019. Namun secara simultan pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah, jumlah penduduk, IPM dan angkatan kerja berpengaruh signifikan terhadap naik turunnya kemiskinan Provinsi Jambi dengan besar R-squared 87,00 persen.

Kata Kunci : *Pengeluaran Pemerintah, Jumlah Penduduk Produktif, Angkatan Kerja Yang Bekerja, Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia Dan Kemiskinan*

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah utama di setiap negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Oleh karena itu, maka setiap negara terus berusaha mengurangi dan menghapus kemiskinan tersebut (Syekh, 2014). Kemiskinan di Provinsi Jambi menjadi suatu permasalahan, yakni relatif tingginya pertumbuhan ekonomi ternyata belum dapat meningkatkan jumlah kesempatan kerja yang memadai serta menurunkan angka kemiskinan. Ada beberapa pendapat yang menghubungkan antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan di suatu Negara.

Deininger dan Squire (dalam Syekh, 2014), menyimpulkan bahwa ada korelasi positif antara pertumbuhan ekonomi suatu negara dengan peningkatan angka kemiskinan. Dalam arti apabila pertumbuhan ekonomi tinggi, maka di sisi lain akan terjadi *trade-off* dengan tingginya

angka kemiskinan. Sebaliknya studi yang dilakukan oleh World Bank, Fields dan Jakobson serta Revallion (dalam Syekh, 2014), menunjukkan tidak ada korelasi antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kemiskinan. Dengan kata lain, tinggi rendahnya tingkat kemiskinan di suatu negara tidak ditentukan oleh laju pertumbuhan ekonomi yang terjadi.

Salah satu aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran. Pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya dapat menjadi instrument tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah, jumlah penduduk, indeks pembangunan manusia dan angkatan kerja terhadap kemiskinan di Provinsi Jambi.

LANDASAN TEORITIS

Argumentasi mengenai teori dan konsep kemiskinan sangatlah beragam. Baik dilihat dari definisi dan criteria untuk menentukan arti kemiskinan maupun dalam pengukuran tingkat kemiskinan itu sendiri. Menurut Anonim (2009), kemiskinan adalah suatu situasi dimana seseorang atau rumah tangga mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar, sementara lingkungan pendukungnya kurang memberikan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkesinambungan atau untuk keluar dari kerentanan. Pada dasarnya definisi kemiskinan dapat dilihat dari dua sisi, yaitu :

1. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan yang dikaitkan dengan perkiraan tingkat pendapatan dan kebutuhan yang hanya dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang untuk hidup secara layak. Bank dunia mendefinisikan kemiskinan absolut sebagai hidup dengan pendapatan di bawah USD \$1/hari dan kemiskinan menengah untuk pendapatan di bawah \$2/hari.

2. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan dilihat dari aspek ketimpangan sosial, karena ada orang yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya tetapi masih jauh lebih rendah dibanding masyarakat sekitarnya (lingkungannya).

Selanjutnya menurut Anonim (2009), mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar masyarakat antara lain, terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki.

Keadaan kemiskinan umumnya diukur dengan tingkat pendapatan dan pada dasarnya dapat dibedakan menjadi kemiskinan absolut, yaitu apabila tingkat pendapatannya lebih rendah daripada garis kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif, yaitu keadaan perbandingan antara kelompok pendapatan dalam masyarakat, yaitu antara kelompok yang mungkin tidak miskin, karena mempunyai tingkat pendapatan yang lebih tinggi daripada garis kemiskinan dan kelompok masyarakat yang relatif lebih kaya. Dengan menggunakan ukuran pendapatan, maka keadaan ini dikenal dengan ketimpangan distribusi pendapatan.

Selain itu berdasarkan pola waktunya, kemiskinan dapat dibedakan menjadi *persisten poverty* (kemiskinan yang telah kronis atau turun temurun), *cyclical poverty* (kemiskinan yang mengikutipolasiklusekonomisecarakeseluruhan), *seasonal poverty* (kemiskinan musiman seperti sering dijumpai pada kasus nelayan pertanian) serta *accidental poverty* (kemiskinan karena terjadi bencana alam/dampak dari suatu kebijakan tertentu yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan suatu masyarakat).

Kuncoro (2000) mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum. Bank Dunia sebagaimana dikutip Prayitno (2001) menunjukkan adanya tiga dimensi kemiskinan, yaitu Pertama, kemiskinan multidimensional, artinya karena kebutuhan manusia itu bermacam-macam, maka kemiskinanpun memiliki banyak aspek. Dilihat dari kebijakan umum, maka kemiskinan meliputi aspek primer yang berupa miskin akan aset, organisasi social politik, dan pengetahuan serta keterampilan; dan aspek sekunder yang berupa miskin akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan dan informasi. Dimensi-dimensi kemiskinan tersebut termanifestasikan dalam bentuk kekurangan gizi, air, perumahan yang tidak sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik, dan tingkat pendidikan yang rendah.

Kedua, aspek-aspek kemiskinan saling berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini berarti bahwa kemajuan dan atau kemunduran pada salah satu aspek dapat mempengaruhi kemajuan atau kemunduran pada aspek lainnya. Ketiga, bahwa yang miskin adalah manusianya, baik secara individual maupun kolektif. Dimana kita sering mendengar perkataan kemiskinan perkotaan (*urban poverty*) dan kemiskinan pedesaan (*rural poverty*).

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Todaro (2000) mengungkapkan bahwa generalisasi yang paling tepat tentang kemiskinan adalah mereka yang ditempatkan di daerah pedesaan secara tidak seimbang, dan terutama sekali mereka yang bekerja di bidang pertanian atau kegiatan-kegiatan usaha bersama.

Aima (2003) mengungkapkan bahwa dilihat dari faktor penyebabnya dapat dikategorikan dalam beberapa jenis, yaitu :

1. Kemiskinan alamiah; yaitu kemiskinan timbul disuatu daerah karena sumberdaya alamnya kurang mendukung terhadap penghidupan penduduk, misalnya kering, tandus, rawan bencana alam.
2. Kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang timbul disuatu wilayah karena daerahnya tidak mempunyai sarana dan prasarana untuk menunjang penghidupan masyarakat, sehingga penduduk tidak mempunyai akses untuk mendapatkan peluang ekonomi yang ada.
3. Kemiskinan kultural, yaitu kemiskinan yang timbul karena factor sifat dan budaya manusia itu sendiri yang kurang mendukung untuk perbaikan kehidupannya seperti malas, menerima apa adanya, kurang tanggap terhadap kemajuan pembangunan.
4. Kemiskinan temporer, yaitu keadaan keluarga penduduk menjadi miskin sebagai akibat bencana alam, seperti kebakaran, kebanjiran, gempa bumi.

Reksohadiprodjo (2009) menentukan garis kemiskinan dengan menggunakan konsumsi beras per kapita. Untuk daerah pedesaan ditentukan 240 Kg per kapita per tahun sedangkan kota 360 Kg per kapita per tahun. Untuk mencari nilai konsumsinya masing-masing kuantitas

tersebut dikalikan harga beras pada saat yang bersangkutan dan rata-rata anggota tiap rumah tangga adalah 5 orang.

Tabel 1.
Garis Kemiskinan Berdasarkan Konsumsi Beras/Kapita/Tahun

Kriteria	Pedesaan	Perkotaan
Melarat	180 Kg/Kapita	270 Kg/Kapita
Sangat Miskin	240 Kg/Kapita	360 Kg/Kapita
Miskin	320 Kg/Kapita	480 Kg/Kapita

Sumber : Reksohadiprojo (2009)

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data sekunder. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang disajikan dalam bentuk data tahunan/series mulai tahun 2010-2019, berupa: 1) PDRB Provinsi Jambi menurut Lapangan Usaha, 2) Indikator Ekonomi Provinsi Jambi, dan 3) Data Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Perkapita, Pengeluaran Pemerintah, IPM, Inflasi, Angkatan Kerja, Tenaga Kerja dan Jumlah Penduduk dari BPS Provinsi Jambi.

Model analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda semi logaritma berdasarkan ada perbedaan satuan ukur setiap variabel regresi. Data time series ini diolah dengan bantuan software Eviews seri 8.0. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi variabel independent terhadap variabel dependent. Dimana dalam penelitian ini, Pertumbuhan Ekonomi (GE), Pengeluaran Perkapita (PP), Jumlah Penduduk (penduduk yang usia produktif) (JP), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan angkatan kerja (penduduk bekerja) (AK) sebagai variabel independent (variable bebas), akan dianalisis pengaruhnya terhadap kemiskinan (jumlah penduduk miskin) (KEMIS) sebagai variabel dependent (variable terikat).

Model persamaan regresi dalam penelitian ini dengan spesifikasi model dasar sebagai berikut :

$KEMIS = f\{ GE, PP, JP, IPM, AK, ;\}$, berdasarkan model dasar dapat di formulasikan menjadi persamaan regresi linear berganda dengan data time series sebagai berikut :

$$\text{LogKEMIS}_t = \beta_0 + \beta_1 \text{GE}_t + \beta_2 \text{LogPP}_t + \beta_3 \text{LogJP}_t + \beta_4 \text{IPM}_t + \beta_5 \text{LogAK}_t + \mu_t$$

KEMIS	= Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)
GE	= Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi (Persen)
PP	= Pengeluaran Perkapita (Juta Rupiah)
JP	= Jumlah Penduduk Produktif usia 15-65 tahun Provinsi Jambi (Jiwa)
IPM	= Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jambi (Tahun)
AK	= Angkatan Kerja khusus orang yang bekerja Provinsi Jambi (Jiwa)
Log	= Logaritma
β_0	= Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_5$	= koefisien regresi untuk masing-masing variable bebas
μ	= standar error
t	= waktu

Pengujian regresi linier berganda dengan menggunakan *Ordinat Least Square* (OLS) dapat dilakukan setelah model dari penelitian ini memenuhi syarat-syarat yaitu lolos dari asumsi klasik. Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah data tersebut tidak mengandung multi kolinearitas, dan heterokedastisitas. Untuk itu sebelum melakukan pengujian regresi linier berganda perlu dilakukan lebih dahulu pengujian asumsi klasik, yang terdiri dari: uji Multikolinearitas, uji Autokorelasi dan uji Heteroskedastisitas

Uji hipotesis secara statistik, setidaknya ini dapat diukur dari nilai statistik t, nilai statistik F dan nilai koefisien determinasi. Perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana H_0 ditolak). Sebaliknya disebut tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana H_0 diterima.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan kemiskinan pemerintah Provinsi Jambi tahun 2010-2019 dapat terlihat pada tabel dibawah ini. Berdasarkan tabel 2 secara keseluruhan dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan angka kemiskinan jika diteliti secara keseluruhan di Provinsi Jambi sangat berfluktuasi.

Tabel 2
Angka Kemiskinan Provinsi Jambi Tahun 2010-2019

Tahun	Angka Kemiskinan (Jiwa)	Perkembangan (Persen)
2010	260.400	
2011	251.800	-3,30
2012	268.500	6,63
2013	277.700	3,43
2014	281.750	1,46
2015	300.710	6,73
2016	289.810	-3,62
2017	286.550	-1,12
2018	282.766	-1,32
2019	274.320	-2,99
Rata-Rata	277.431	0,66

Sumber: (<http://www.bi.go.id>), dan (Anonim, 2020)

Secara absolut laju peningkatan penduduk miskin tertinggi terjadi pada tahun 2015, yaitu sebanyak 300.710 jiwa atau mengalami peningkatan sebesar 6,73 persen. Peningkatan yang cukup tinggi sebagai dampak penurunan daya beli masyarakat karena kenaikan harga-harga barang yang terus menerus, terutama barang yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat.

Laju penurunan jumlah penduduk miskin tertinggi terjadi pada tahun 2011, yaitu sebesar 251.800 jiwa atau turun sebesar 3,30 persen. Penurunan jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi ini tidak terlepas dari berbagai kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Jambi sendiri yang mampu memberikan stimulus pengurangan jumlah penduduk miskin. Selama periode 2010-2019 angka kemiskinan penduduk Provinsi Jambi mengalami peningkatan sebesar 0,66 persen pertahun. Peningkatan jumlah penduduk miskin memberikan gambaran bahwa laju pertumbuhan ekonomi yang cenderung positif diikuti pula dengan kecenderungan penurunan jumlah penduduk miskin.

Memetakan angka kemiskinan tidak cukup hanya menghitung jumlah orang miskin. Akan tetapi pemerintah juga perlu mengetahui tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di Provinsi Jambi. Kemiskinan memiliki tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan yang beragam, sehingga alokasi dana untuk pengentasan kemiskinan perlu menimbang factor tersebut. Berikut ini dapat dilihat perkembangan persentase penduduk miskin (P0), indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2) Provinsi Jambi selama tahun 2010-2018 yang dapat dilihat dari table 3 dibawah ini:

Tabel 3
Perkembangan Persentase Penduduk Miskin (P0), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)
Dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Jambi Selama Tahun 2010-2019

Tahun	Persentase Penduduk Miskin (P0)	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
2010	8,40	1,21	0,30
2011	7,90	1,02	0,23
2012	8,28	1,37	0,26
2013	8,41	1,12	0,26
2014	8,39	1,12	0,23
2015	8,86	1,42	0,35
2016	8,41	1,47	0,37
2017	8,19	1,28	0,29
2018	7,92	1,30	0,32
2019	7,60	1,23	0,30
Rerata	8,24	1,25	0,29

Sumber: (<http://www.bi.go.id>), dan (Anonim, 2020)

Berdasarkan tabel 3 diatas terlihat persentase penduduk miskin (P0) selama periode 2010 hingga 2019 rata-rata 8,24 persen. Sedangkan untuk indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2) di periode tahun yang sama masing-masing rata-rata 1,25 untuk indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan 0,29 untuk indeks keparahan kemiskinan (P2).

Analisis secara kuantitatif untuk melihat seberapa besar pengaruh pertumbuhan ekonomi, pengeluaran perkapita, jumlah penduduk, indeks pembangunan manusia dan angkatan kerja terhadap kemiskinan di Provinsi Jambi, dengan pengujian model kuantitatif menggunakan Metode Linier Berganda, melalui program Eviews versi 8.0, dimana hasil Hipotesis pengujian model Regresi Linier Berganda dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 4: Hasil Regresi Linear Berganda Dengan Eviews 8.0

Dependent Variable: LOG(KEMIS)
Method: Least Squares
Date: 09/23/20 Time: 08:47
Sample: 2000 2019
Included observations: 20

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	297.3802	82.93893	3.585532	0.0030
GE	-0.157488	0.048441	-3.251130	0.0023
LOG(PP)	-1.351797	0.961098	1.406513	0.1814
LOG(JP)	2.431816	0.789035	-3.082013	0.0190
IPM	-0.160489	0.039247	-4.089204	0.0000
LOG(AK)	4.124805	7.077417	0.582812	0.5693
R-squared	0.870003	Mean dependent var		9.761500
Adjusted R-squared	0.823575	S.D. dependent var		1.906093
S.E. of regression	0.800615	Akaike info criterion		2.636452
Sum squared resid	8.973781	Schwarz criterion		2.935172
Log likelihood	-20.36452	Hannan-Quinn criter.		2.694765
F-statistic	18.73895	Durbin-Watson stat		0.925810
Prob(F-statistic)	0.000009			

*Keterangan: *) Signifikan pada $\alpha = 5\%$*

$$\text{LogKEMIS}_t = 297,38 - 0,157\text{GE}_t - 1,352\text{LogPP}_t + 2,432\text{LogJP}_t - 0,160\text{IPM}_t + 4,125\text{LogAK}_t + \mu_t$$

Nilai angka koefisien β_0 untuk kabupaten/kota sebesar 297,38 artinya, apabila pada periode 2000-2019 tidak terjadi perubahan pertumbuhan ekonomi (GE), pengeluaran pemerintah (PP), jumlah penduduk (JP), indeks pembangunan manusia (IPM) dan angkatan kerja (AK) atau dengan asumsi konstan, maka kemiskinan (KEMIS) di Provinsi Jambi adalah mengalami peningkatan sebesar 297,38 jiwa pertahun. Ini mengindikasikan bahwa uraian hasil regresi dapat terlihat bahwa meski variabel bebas stagnan namun tetap meningkatkan kemiskinan Provinsi Jambi. Berdasarkan hasil penelitian diatas terlihat pemerintah daerah berupaya meminimalisasi kemiskinan melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi, tetapi belum dapat mengatasi kemiskinan yang terjadi di Provinsi Jambi. Hal ini dikarenakan pemerintah hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam bentuk peningkatan barang dan jasa yang tidak diikuti pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Akibatnya terjadi kesenjangan ekonomi antar daerah dimana masing-masing daerah meningkatkan pendapatan daerahnya berdasarkan potensi yang dimiliki.

Untuk koefisien regresi variabel pertumbuhan ekonomi (GE) (β_1) diperoleh nilai sebesar -0,157 artinya apabila terjadi kenaikan atau peningkatan pertumbuhan ekonomi (GE)

sebesar 1 persen, maka akan menurunkan kemiskinan di Provinsi Jambi sebesar 0,157persen dengan asumsi bahwa variabel lain tetap (*Ceteris paribus*) atau tidak terjadi perubahan atau konstan. Dalam hal ini dijelaskan upaya penanggulangan kemiskinan pemerintah daerah daerah belum optimal, akibat dari pesatnya pertumbuhan ekonomi yang tidak diikuti sistem pengendalian lonjakan urbanisasi manusia terhadap mobilitas faktor produksi. Sehingga potensi yang dimiliki daerah menjadi daya tarik bagi daerah sekitar. Hal ini menjadi bomerang negatif terhadap pengentasan kemiskinan, sehingga pertumbuhan ekonomi yang tinggi berdampak kecil pada penurunan angka kemiskinan di Provinsi Jambi.

Begitu juga koefisien regresi variabel pengeluaran perkapita (PP) (β_2) diperoleh nilai sebesar 1,352 artinya apabila terjadi kenaikan atau peningkatan pengeluaran perkapita (PP) di Provinsi Jambi sebesar 1 persen, maka akan menurunkan kemiskinan sebesar 1,352persen dengan asumsi bahwa variabel lain tetap (*Ceteris paribus*) atau tidak terjadi perubahan atau konstan. Wilayah berproduktivitas rendah yang dilihat dari pengeluaran perkapita mempunyai hubungan timbal balik dengan kemiskinan, baik sebagai penyebab maupun sebagai akibat. Oleh karena itu, suatu wilayah yang tingkat pengeluaran perkapitanya rendah dapat mengakibatkan masyarakatnya miskin. Demikian pula sebaliknya, ketidakmampuan masyarakat mengelola sumberdaya mengakibatkan wilayah itu miskin. Pengeluaran perkapita (PP) sangat bervariasi setiap daerah yang disebabkan oleh factor potensi daerah, tetapi juga karakteristik rumah tangga. Aksesibilitas ke daerah perkotaan yang merupakan pusat kegiatan ekonomi seringkali merupakan factor dominan terhadap variasi struktur pengeluaran perkapita Provinsi Jambi. Sehingga secara garis besar pengeluaran perkapita tidak berpengaruh signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan di Provinsi Jambi.

Sedangkan koefisien regresi variabel jumlah penduduk (JP) (β_3) diperoleh nilai sebesar -2,43 artinya apabila terjadi kenaikan atau peningkatan jumlah penduduk (JP) sebesar 1 persen, maka akan meningkatkan kemiskinan Provinsi Jambi sebanyak 2,43 persen dengan asumsi bahwa variabel lain tetap (*Ceteris paribus*) atau tidak terjadi perubahan atau konstan. Hasil perhitungan analisis regresi berganda menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh terhadap kemiskinan. Hasil ini sesuai dengan teori dan penelitian terdahulu, yang menjadi landasan teori dalam penelitian ini. Menurut teori Malthus yaitu populasi penduduk cenderung bertambah menurut deret ukur (secara geometris), sedangkan produksi makanan (sumber daya alam) cenderung bertambah menurut deret hitung (secara aritmatika). Akibatnya ketidak seimbangan antara sumberdaya bumi yang tidak mampu memenuhi kebutuhan

penduduk yang terus bertambah. Dengan kata lain jika perkembangan sumber daya tidak dapat mendukung perkembangan penduduk maka akan menyebabkan kemiskinan bertambah. Hal ini disebabkan sumber daya bumi atau potensi daerah tidak bisa mengimbangi kebutuhan populasi yang terus bertambah di Provinsi Jambi, akibatnya kebutuhan manusia yang bersifat tidak terbatas berbanding terbalik dengan jumlah sumberdaya alam yang digunakan sebagai alat pemuas kebutuhan manusia bersifat terbatas, ini akan mendorong manusia mendekati garis kemiskinan karena persaingan yang cukup ketat dalam pemenuhan kebutuhan hidup.

Begitu juga koefisien regresi variabel indeks pembangunan manusia (IPM) (β_4) diperoleh nilai sebesar -0,160 artinya apabila terjadi kenaikan atau peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) sebesar 1 persen, maka akan menurunkan kemiskinan di Provinsi Jambi sebanyak 0,16 persen dengan asumsi bahwa variabel lain tetap (*Ceteris paribus*) atau tidak terjadi perubahan atau konstan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata sederhana dari tiga indeks yang menggambarkan kemampuan dasar manusia dalam memperluas pilihan-pilihan, yaitu: Indeks Harapan Hidup, Indeks Pendidikan, dan Indeks Standar, Hidup Layak. Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh IPM terhadap kemiskinan di Provinsi Jambi tahun 2000-2019, dapat diketahui bahwa IPM mempengaruhi pengentasan kemiskinan secara negatif dan signifikan. Hal ini disebabkan perbaikan akses terhadap pelayanan sosial berupa IPM (pendidikan, kesehatan dan pendapatan) mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas berdaya saing dalam dunia kerja. Sehingga produktivitas SDM masih relatif rendah dan pada akhirnya justru menurunkan kemiskinan di Provinsi Jambi.

Dan untuk koefisien regresi variabel angkatan kerja (AK) (β_5) diperoleh nilai sebesar 4,125 artinya apabila terjadi kenaikan atau peningkatan angkatan kerja (AK) sebesar 1 persen, maka akan meningkatkan kemiskinan Provinsi Jambi sebanyak 4,12 persen dengan asumsi bahwa variabel lain tetap (*Ceteris paribus*) atau tidak terjadi perubahan atau konstan. Angkatan kerja yang besar akan terbentuk dari jumlah penduduk yang tinggi. Kenaikan jumlah penduduk tanpa dibarengi dengan kemajuan faktor-faktor perkembangan yang lain tentu akan menaikkan pendapatan dan permintaan. Dengan demikian kemiskinan kaitannya dengan jumlah penduduk yang tinggi adalah keberadaan lapangan pekerjaan yang tidak bias menampung kebutuhan angkatan kerja yang tercipta tersebut, sehingga terciptalah pengangguran yang berujung terhadap peningkatan kemiskinan di Provinsi Jambi.

KESIMPULAN

Pertumbuhan ekonomi (GE) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan dalam menurunkan kemiskinan Provinsi Jambi, sedangkan jumlah penduduk produktif (JP) justru berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kemiskinan di Provinsi Jambi selama periode 2010-2019. Sedangkan pengeluaran pemerintah dan angkatan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap naik atau turunnya kemiskinan Provinsi Jambi selama periode 2010-2019. Namun secara simultan pertumbuhan ekonomi, pengeluaran perkapita, jumlah penduduk, indeks pembangunan manusia dan angkatan kerja berpengaruh signifikan terhadap naik turunnya kemiskinan Provinsi Jambi dengan besar *R-squared* 87,00 persen.

DAFTAR PUSTAKA

- Aima, H. (2003). *An evaluation of poverty alleviation in sarkodistrik*. central Luzon states university.
- Anonim. (2009). "*Laporan Pembangunan Manusia Indonesia 2009, Menuju Konsensus Baru Demokrasi dan pembangunan Manusia Di Indonesia.*" Bappenas, BPS,UNDP.
- Anonim. (2020). *Provinsi Jambi Dalam Angka 2011-2017*. Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi.
- Kuncoro, M. (2000). *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan*.
- Prayitno. (2001). *Pendidikan Karakter Dalam Pembangunan Bangsa*. PT. Grafindo Persada.
- Reksohadiprodjo, S. (2009). *Ekonomi Sumberdaya Alam dan Energi Edisi 2*.
- Soleh, A. (2018). Analisis dan Strategi Pengentasan Kemiskinan Di Provinsi Jambi. *EKSIS: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 9(1), 79-90.
- Syekh, S. (2014). *Pengantar Makro Ekonomi (Revisi)*. Garuda Persada Press.
- Todaro, M. P. (2000). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Edisi Ketujuh*. Erlangga.